BAB II

DINAMIKA EKONOMI POLITIK AMERIKA SERIKAT DAN KEBIJAKAN TARIF IMPOR BAJA DAN ALUMUNIUM TAHUN 2018

Pada bab ini penulis akan membahas tentang dinamika ekonomi politik Amerika Serikat yang diawali sejak pasca Perang Dunia ke-II, dimana peran Amerika Serikat dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat menuju arah yang lebih liberal dari sebelumnya. Penulis juga akan membahas tentang beberapa kebijakan tarif pada masa pemerintahan Amerika Serikat sebelum Pemerintahan Presiden Donald Trump. Serta akan dipaparkan secara garis besar tentang isi dari kebijakan tarif impor baja dan alumunium tahun 2018.

A. Dinamika Ekonomi Politik Amerika Serikat dalam Ekonomi Liberal

Amerika Serikat saat ini merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Salah satu indikator perekonomian suatu negara adalah *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Gross National Product* (GNP). GDP merujuk pada kemampuan produksi barang dan jasa dalam lingkup domestik wilayah negara dalam suatu periode. Sedangkan GNP merupakan keseluruhan pendapatan dan kemampuan seluruh warga negara dalam memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu dan tidak terbatas oleh wilayah dimana warga negara tersebut berada, namun tidak termasuk warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut (Mankiw, Principles of Macroeconomics: Sixth Edition, 2011). Pada tahun 2017 GDP Amerika Serikat berada pada nilai 19.390,6 triliun dolar Amerika Serikat (World Bank, 2018). Sedangkan GNP Amerika Serikat berada pada angka 18.766,3 triliun dolar Amerika Serikat (U.S. Bureau of Economic Analysis, 2018).

Pasca Perang Dunia ke-II, Amerika Serikat mulai gencar melakukan kebijakan luar negeri dan politik luar negeri yang lebih liberal dibandingkan sebelumnya. Penerapan kebijakan dan politik luar negeri yang liberal tersebut merupakan respon dalam menyesuaikan diri dengan kondisi internasional saat itu setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II (Baldwin & Krueger, 1984). Masa-masa sebelum Perang Dunia ke-II berakhir, para pemimpin dalam pembuatan kebijakan luar negeri khususnya dari Partai Demokrat di Amerika Serikat, menilai jika kurangnya keterbukaan ekonomi dunia pada era 1930-an telah menjadi salah satu penyebab pecahnya Perang Dunia ke-II. Sehingga saat itu dirasakan perlu bagi Amerika Serikat untuk memimpin dan mebentuk sebuah tatanan sistem pasar internasional yang lebih terbuka dan bebas. Sistem ini dinilai sebagai suatu bentuk pondasi ekonomi bagi perdamaian dunia (Baldwin & Krueger, 1984).

Pasca Perang Dunia ke-II, Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Roosevelt mengajukan kepada Kongres Amerika Serikat tentang organisasi perdagangan multilateral, selain itu Pemerintahan Roosevelt juga mengajukan pengurangan tariff yang baru dan lebih dari sebelumnya. Pengurangan tarif dalam ekonomi internasional saat itu memberikan dampak positif bagi Amerika Serikat, karena negara yang menjadi tujuan ekspor dari produk Amerika Serikat juga memberikan keringan tarif bagi produk asal Amerika Serikat yang masuk ke negaranya (Baldwin & Krueger, 1984).

Salah satu faktor yang mendorong kebijakan dan tidakan politik luar negeri Amerika Serikat yang lebih liberal tersebut adalah faktor politik dalam negeri, yakni adanya dukungan oleh Partai Demokrat terhadap pemerintahan saat itu. Karena gagasan tentang sistem perdagangan internasional, dirasa sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat.

Kebijakan ekonomi yakni pengurangan tarif impor yang terus berkembang, terutama pasca Perang Dunia ke-II, tidak selalu didukung. Hambatan terhadap kebijakan ini dirasakan, karena pengurangan tarif dinilai dapat mengancam produk domestik. Pada tahun 1945, Pemerintahan Roosevelt menyadari adanya kemungkinan kerugian dimasa datang dapat dialami oleh Amerika Serikat dari persetujuan perjanjian perdagangan. Sehingga pemerintahan saat itu memberikan opsi untuk meperbolehkan menarik diri dari perjanjian atau menyesuaikan kembali perjanjian serta menarik diri dari pengurangan tariff yang berkaitan, jika terjadi peningkatan impor yang mengancam industri dalam negeri (Baldwin & Krueger, 1984).

Namun secara garis besar, kebijakan perdagangan Amerikat Serikat pasca Perang Dunia ke-II lebih mengarah kepada kebijakan perdagangan liberal dari pada kebijakan perdagangan bebas. Hal ini ditunjukan dari tinndakan perlidungan atau proteksi terhadap suatu industri diperbolehkan jika sektor industri tersebut terancam oleh peningkatan impor yang terjadi (Baldwin & Krueger, 1984).

Kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat, tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang pembuat keputusan, namun partai dan kelompok tertentu juga meberikan pengaruh bagaimana arah kebijakan Amerika Serikat terbentuk. Dukungan dari kondisi politik dalam negeri meberikan pengaruh terhadap arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih liberal. Partai Demokrat yang identik dengan liberal pada tahun 1951, justru mendukung opsi untuk melindungi industri dalam negeri jika sewaktu-waktu terkena dampak negative dari impor yang berlebih (Baldwin & Krueger, 1984). Sedangkan Partai Republik saat itu mendukung upaya pemerintahan sebelumnya untuk mebentu suatu sistem perdagangan liberal internasional (Baldwin & Krueger, 1984).

Memasuki tahun 1952, ketika Partai Republik menguasai mayoritas Kongres dan memimpin Pemerintahan Amerika Serikat, beberapa Republikan[1] memiliki ekspektasi terhadap arah kebijakan Amerika Serikat yang kembali pada kebijakan proteksionisme. Proteksionisme dapat di definisikan sebagai suatu kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan, dimana bentuk proteksionisme ini dapat berupa tarif dan non-tarif (Fouda, 2012). Beberapa anggota Partai Republik terutama yang menjadi pemimpin dalam dunia bisnis yang besar di Amerika Serikat, berpendapat jika perdagangan liberal meberika keuntungan berdasarkan perspektif ekonomi mereka (Baldwin & Krueger, 1984).

Pada tahun 1953 hingga 1954 kebijakan pengurangan tarif mulai berkurang karena mendapatkan perlawanan atau pertentangan dari anggota kongres dari Partai Republik. Pada tahun 1955, Presiden Eisenhower dengan bantuan dari anggota Kongres dari partai Demokrat berhasil mendapatkan wewenang untuk mengurangi tarif sebesar 15 persen dan pada tahun 1958 mendapatkan dukungan kembali dalam wewenang pengurangan tarif sebesar 20 persen (Baldwin & Krueger, 1984)

Salah satu bentuk proteksi Amerika Serikat terhadap dampak dari impor dan pengurangan tarif impor ke Amerika Serikat adalah ketika di tahun 1955 industri baja dan minyak berhasil mendapatkan klausul keamanan nasional berdasarkan undang-undang perdagangan tahun 1955, yang menyebabkan pembatasan kuota impor jika impor suatu produk mengancam keamanan nasional, dan pada tahun 1958 diterapkan batasan kuota terhadap produk minyak berdasarkan klausul tersebut secara sementara, hingga tahun 1959 diterapkan secara permanen (Baldwin & Krueger, 1984).

Perubahan arah kebijakan dan politik luar negeri Amerika Serikat yang mengedepankan nilai liberal dan

[1] Sebutan bagi anggota Partai Republik di Amerika Serikat

pengurangan tarif tidak selalu bejalan dengan mulus. Selain adanya proteksionisme dan hambatan dalam tindakan pengurangan tarif yang diajukan oleh Pemerintahan Eisenhower. Pada akhir tahun 1960-an kelompok pekerja atau buruh di Amerika Serikat menyuarakan bahwa banyaknya lapangan pekerjaan yang berkurang pada saat itu disebabkan oleh perkonomian yang liberal. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat justru dialirkan ke luar negeri sehingga lapangan pekerjaan dalam negeri tidak berkembang (Baldwin & Krueger, 1984).

Perkembangan ekonomi politik Amerika Serikat pasca Perang Dunia ke-II yang lebih liberal, menemui titik jenuhnya pada tahun akhir 1970-an dimana Amerika Serikat menjadi lebih sensitif terhadap pandangan tentang perdagangan yang tidak adil dan dapat merugikan Amerika Serikat (Richardson, 1994). Beberapa kebijakan yang merespon kondisi ketakutan akan dampak negatif dari perdagangan bebas dan ekonomi yang liberal diambil oleh Pemerintahan Amerika Serikat saat itu, kebijakan yang lebih mengarah pada proteksi bagi negara seperti kebijakan tarif dan non-tarif.

Amerika Serikat pada tahun 1981 menerapkan sebuah kebijakan non-tarif yakni pembatasan ekspor kendaraan atau disebut sebagai *voluntary export restraint (*VRAs*)*, yang dilakukan oleh Jepang ke Amerika Serikat, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri otomotif Amerika Serikat (Baldwin & Krueger, 1984). Lalu pada tahun 1982, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah kebijakan *anti-dumping* terhadap komoditi baja. *Dumping* dapat diartikan sebagai suatu ekspor yang dilakukan ke suatu negara dengan menerapkan harga barang ekspor lebih rendah dari pada harga barang yang sama di negara tujuan ekspor (Baldwin & Krueger, 1984).

Kedua kebijakan tersebut, yakni kebijakan pembatasan ekspor atau kuota produk kendaraan dari Jepang pada tahun 1981 dan Kebijakan *anti-dumping* terhadap komoditi baja pada tahun 1982 adalah contoh kebijakan

Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh ketakutan akan dampak dari perdagangan internasional yang liberal. Dan hal tersebut mengindikasikan jika perkembangan dan dinamika ekonomi politik Amerika Serikat tidak selalu mengarah pada nilai liberal, namun ketika ada dampak atau hal yang merugikan bagi Amerika Serikat, proteksi terhadap negara dari dampak ekonomi internasional yang liberal tetap dilakukan.

Memasuki tahun 1990-an, perekonomian Amerika Serikat telah berkembang dan lebih terbuka dari sebelumnya (Lawrence, 2002). Globalisasi menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi pada tahun 1990-an, pasar ekspor yang berkembang dan lebih luas dari sebelumnya mendorong perekonomian Amerika Serikat untuk terus berkembang dengan inovasi dan investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Pergerakan barang dan jasa secara global juga meberikan dampak positif tersendiri bagi perekonomian dunia, khususnya Amerika Serikat. Namun salah satu faktor penting dari tercapainya kondisi perekonomian yang sedemikian rupa adalah kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintahan saat itu (Lawrence, 2002).

Liberalisasi perdagangan yang meluas, menjadikan kegiatan ekonomi tidak lagi sebatas pergerakan barang. Tetapi telah meberikan ruang bagi jasa dan investasi asing untuk bergerak lebih leluasa dan lebih luas dalam perekonomian internasional. Perjanjian perdagangan mulai mencakup hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai urusan domestik seperti, regulasi pemerintahan, kompetisi perusahaan, lingkungan, hingga tenaga kerja (Lawrence, 2002).

Pemerintahan Amerika Serikat pada masa Presiden Clinton, di tahun 1993 menjelaskan bagaimana arah yang di ambil oleh Amerika Serikat dalam perekonomian internasional. Presiden Clinton menyatakan jika prinsip yang diambil oleh Amerika Serikat pada saat itu bukan untuk menyerah, namun hal tersebut adalah bentuk kompetisi dalam ekonomi internasional (Lawrence, 2002). Upaya untuk

membuka pasar asing bagi eksportir dan perusahaan Amerika Serikat menjadi tujuan yang dari pemerintahan saat itu melalui perjanjian multilateral, bilateral, dan prulilateral (Lawrence, 2002). Dari hal tersebut juga akan membuka pasar Amerika Serikat bagi produk dan jasa dari negara lain namun juga berlaku bagi produk dan jasa dari Amerika Serikat masuk ke negara lain. Arah kebijakan pemerintahan Clinton yang mendukung ekonomi liberal dan ikut berkompetisi dalam perekonomian internasional mendorong peran yang lebih jauh dari Amerika dalam kerjasama multilateral, hingga terbentuknya WTO pada tahun 1995 dan menggantikan GATT (Lawrence, 2002). WTO memberikan tatanan sistem internasional khususnya bagi perdagangan internasional yang lebih adil.

Tahun 2000-an Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Bush. menunjukan dinamika ekonomi politik yang berbeda, Menghadapi resesi perekonomian pada tahun 2001 (Amadeo, Bush Administration Economic Policies, 2018), Resesi dapat diartikan sebagai melemahnya aktivitas ekonomi suatu negara dalam periode tertentu (Claessens & Kose, 2009). kondisi resesi ekonomi yang dihadapi oleh Amerika Serikat, menjadikan Pemerintahan Bush menerapkan kebijakan *The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001*. Dari kebijakan tersebut pemotongan pajak menjadi salah satu isi dari kebijakan yang bertujuan meningkatan daya beli masyarakat saat itu (Amadeo, EGTRRA: The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001, 2017). Di tahun 2002 Pemerintahan Bush juga menerapkan kebijakan tarif impor terhadap baja, kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk respon pemerintah dalam menangani kondisi industri baja dalam negeri yang memburuk dan terancam dari impor produk sejenis (Read, 2005).

Kepemimpinan Amerika Serikat berlanjut ketika di tahun 2009, Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Barack Obama. Menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008, pemerintahan Obama dihadapi dengan tantangan untuk

menyelesaikan permasalahan dari dampak krisis ekonomi tahun 2008. Pengangguran, GDP yang menurun, dan tekanan politik menjadi beberapa permasalahan yang segera harus dibenahi oleh Pemerintahan Barack Obama. Pada akhir tahun 2009, GDP Amerika Serikat berada di angka 14418,74 triliun dolar Amerika Serikat, mengindikasikan mengalami penurunan sebesar 2,5 persen di tahun tersebut dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2008 yang berada di angka 14718,58 triliun dolar Amerika Serikat (Kelly, 2018).

Menghadapi dampak krisis ekonomi tahun 2008, pada tahun 2011, Pemerintahan Presiden Barack Obama, mengambil suatu langkah yang dilakukan dalam menghadapi dampak krisis ekonomi tahun 2008 yakni mengambil kebijakan yang lebih berfokus pada upaya penghematan biaya pemerintahan dan pengurangan defisit dari biaya pemerintahan (Peschek, 2011). Di mata masyarakat Amerika Serikat saat itu, mereka mengharapkan kebijakan yang fokus pada pembuatan lapangan kerja baru. Sementara di pihak oposisi pada pemerintahan saat itu, lebih mengharapkan kebijakan peningkatan pajak pada golongan masyarakat atas atau yang berpenghasilan di atas rata-rata, sebagai upaya untuk mengurangi defisit perekonomian dan pemerintahan (Peschek, 2011).

Dinamika ekonomi politik Amerika Serikat yang telah berkembang sejak pasca Perang Dunia ke-II hingga saat ini telah menunjukan kondisi ekonomi politik yang berbeda dari setiap masa pemerintahan presiden Amerika Serikat yang terus berganti. Upaya Amerika Serikat dalam mempromosikan ekonomi yang lebih liberal tidak sepenuhnya memberikan dampak positif bagi perekonomian dan politik negara Amerika Serikat. Ekonomi liberal yang terus berkembang nyatanya dapat memberikan dampak negatif, Amerika Serikat yang merasa terancam dari dampak ini juga menunjukan sisi lain yakni proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri khusunya pada kebijakan ekonomi

Amerika Serikat tak jarang juga dipengaruhi oleh tekanan politik dalam negeri yang dihadapi oleh Amerika Serikat.

B. Kebijakan Tarif dan non-Tarif Amerika Serikat Sejak Perang Dunia ke-II hingga Era sebelum Pemerintahan Presiden Donald Trump

Pada sub-bab ini akan dipaparkan beberapa kebijakan tarif maupun non-tarif yang pernah diambil pada beberapa masa pemerintahan presiden Amerika Serikat sejak pasca Perang Dunia ke-II hingga tahun 2016.

1. Kebijakan Non-Tarif *Voluntary Export Restrains* (VRAs) Amerika Serikat terhadap Produk Baja dari Eropa dan Jepang Tahun 1969

Di tahun 1969, Pemerintahan Amerika Serikat menerapkan kebijakan VRAs terhadap produk baja dari European Community (EC) dan Jepang. VRAs adalah suatu kebijakan dimana pemerintah menerapkan batasan terhadap kuota suatu produk yang akan di ekspor ke suatu negara pada periode waktu tertentu (Johnson, 2002). Industri Amerika Serikat yang terus berkembang, menyebabkan permintaan dan harga terhadap produk baja meningkat di periode tahun 1960-an. Hal ini juga yang mendorong pasar produk baja impor di Amerika Serikat meningkat dari 7,3 persen di tahun 1964, menjadi 16,7 persen di tahun 1968 (Moore, 1996). Peningkatan tersebut disebabkan oleh kemampuan produksi baja dari Eropa dan Jepang yang lebih efisien dan lebih baru pada saat itu.

Kondisi yang dihadapi oleh industri baja Amerika Serikat di akhir tahun 1960-an telah menimbulkan tekanan dan reaksi dari produsen baja serta United Steel Workers of America (USW) atau serikat pekerja baja Amerika Serikat dari adanya kehadiran competitor baru dalam pasar baja di Amerika Serikat. Reaksi yang dilakukan adalah berupa

tuntutan terhadap pemerintah Amerika Serikat saat itu untuk menerapkan batasan impor terhadap produk baja. Dari tekanan tersebut pemerintah Amerika Serikat di tahun 1969 menerapkan kebijakan VRAs terhadap EC dan Jepang. VRAs yang diterapkan memberikan batasan produk ekspor dari EC dan Jepang sebesar 5,8 juta ton baja per tahun. Sebagai gantinya dari penerapan kebijakan ini para pelaku industri baja Amerika Serikat berjanji untuk tidak menuntut proteksionisme terhadap industri baja Amerika Serikat dan akan meningkatkan serta modernisasi pabrik mereka agar lebih efektif dan mampu bersaing dengan produk impor (Moore, 1996). VRAs yang diterapkan di tahun 1969 direncanakan akan berlaku hingga tahun 1974. VRAs terus berlaku hingga tahun 1974, dimana permintaan terhadap baja terus meningkat secara global dan Amerika Serikat tidak menjadi pilihan utama dalam tujuan ekpor produk baja dari negara lain yang memproduksi baja.

2. Kebijakan Non-Tarif *Voluntary Export Restrains* (VRAs) Amerika Serikat terhadap Produk Otomotif Jepang Tahun 1981

Pada tahun 1981 Pemerintahan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Reagan, pada saat itu menerapkan kebijakan VRAs. Industri otomotif Amerika Serikat yang merosot di tahun 1981, mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk menerapkan kebijakan dan kerja sama dengan Jepang. Kerja sama kebijakan yang disetujui adalah VRAs, yang membatasi kuota ekspor produk otomotif atau kendaraan asal Jepang ke Amerika sebesar 1,68 juta unit tiap tahunnya dan efektif mulai tahun 1981 dan berlaku hingga tahun 1984 (Berry, Levinsohn, & Pakes, 1999). Kebijakan ini ditujukan kepada produk otomotif asal Jepang dan khususnya setiap perusahaan otomotif asal Jepang memiliki kuota tersendiri. Namun bagi produk otomotif yang ber merk perusahaan Jepang yang di produksi di Amerika Serikat tidak termasuk dalam perhitungan kuota dari kebijakan tersebut, jadi hanya produk yang diproduksi di Jepang yang termasuk dalam

batasan kuota dari kebijakan ini (Berry, Levinsohn, & Pakes, 1999).

Produk otomotif asal Jepang yang memiliki harga jual yang lebih murah dan lebih efisien dari produk mobil asal Amerika Serikat telah menjadikan industri otomotif Amerika Serikat terancam karena adanya perubahan akan preferansi masyarakat Amerika Serikat untuk membeli produk otomotif asal Jepang karena dinilai lebih menguntungkan dan lebih murah.

Kebijakan VRAs yang diterapkan dari tahun 1981 diperpanjang kembali di tahun 1984. Dan di tahun 1985 kuota yang diterapkan meningkat menjadi 2,30 juta produk otomotif di tahun 1985. Kebijakan ini telah memberikan dampak bagi produk otomotif asal Jepang, dimana harga produk otomotif asal Jepang telah mengalami peningkatan dari sebelum kebijakan VRAs diberlakukan. Pada tahun 1986 hingga 1990, harga produk otomotif asal Jepang secara rata-rata 1.200 dolar Amerika Serikat lebih mahal dibandingkan produk otomotif asal Amerika Serikat (Berry, Levinsohn, & Pakes, 1999). Hal ini menyebabkan perubahan terhadap preferensi masyarakat Amerika Serikat untuk memilih produk otomotif asal Amerika Serikat karena dirasa lebih murah dibandingkan produk otomotif Jepang.

Walaupun kebijakan VRAs yang diterapkan bertujuan untuk merespon industri otomotif Amerika Serikat yang memburuk di tahun 1981. Namun dampak yang dirakan baru terjadi di tahun 1985 hingga 1990 (Berry, Levinsohn, & Pakes, 1999), dimana perusahaan otomotif Amerika Serikat dapat mengambil keuntungan yang lebih dari penjualan produknya walaupun konsumen Amerika Serikat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan harga produk otomotif karena adanya persaingan antara produk asal Amerika Serikat dan Jepang. Kebijakan VRAs akhirnya dicabut atau dihentikan di tahun 1994 pada masa pemerintahan Presiden Clinton.

3. Kebijakan Tarif Baja Pada Masa Pemerintahan Presiden Bush Tahun 2002

Menghadapi merosotnya industri baja di Amerika Serikat pada tahun 1997 hingga 2001, sebanyak lebih dari 30 perusahaan produsen baja dan pengolahan baja telah bangkrut. Presiden Amerika Serikat George W. Bush yang mulai memerintah pada tahun 2001, pada masa kampanye pemilihan umum Presiden Amerika Serikat, menyatakan janjinya kepada pekerja industri baja bahwa ia tidak akan mengesampingkan permasalahan yang dihadapi oleh industri baja dan pekerjanya (Hufbauer & Goodrich, 2003).

Industri baja yang memburuk menyebabkan United Steel Workers of America (USWA) mendesak Presiden Bush untuk mengambil tindakan terhadap kondisi yang ada dan memenuhi janji kampanye yang pernah diucapkannya. Pemerintahan Presiden Bush memberikan respon terhadap tuntutan yang disuarakan oleh USWA dengan mengeluarkan tiga tahapan atau cabang strategi dalam menangani industri baja yang memburuk. Pertama adalah usaha untuk mengatasi kapasitas baja yang berlebih secara global, kedua menghentikan subsidi dan praktik distorsi pasar, dan ketiga adalah melakukan investigasi terhadap 33 tipe produk impor baja dan apakah harus dilakukan langkah pernlindungan bagi produk tersebut (Hufbauer & Goodrich, 2003).

Pada Oktober 2001 US International Trade Commission (ITC) mengeluarkan penyataan bahwa 16 dari 33 tipe produk baja telah di impor ke Amerika Serikat dalam jumlah tertenu yang dapat mengancam industri baja di Amerika Serikat (Hufbauer & Goodrich, 2003). Dan pada Desember, 2001, Commissioner dari ITC merekomendasikan pada Presiden Bush untuk mengambambil tindakan berupa tarif, kuota, atau tarif dan kuota diterapkan terhadap impor yang mengancam industri dalam negeri (Hufbauer & Goodrich, 2003). Berdasarkan laporan dan rekomendasi yang diberikan oleh Commissioner ITC, pada bulan Maret, 2002,

Presiden Bush menerapkan tarif terhadap 14 produk dari 16 produk yang direkomendasikan terhadap industri baja Amerika Serikat.

Tarif yang diterapkan adalah 30 persen tarif terhadap 3 tipe produk baja dan penerapan tarif sebesar 15 persen terhadap tipe produk baja lainnya. Negara Kanada, Meksiko, dan beberapa negara lainnya yang memiliki perjanjian perdagangan khusus dengan Amerika Serikat tidak termasuk dalam negara yang terkena penerapan dalam kebijakan tersebut (Hufbauer & Goodrich, 2003). Namun kebijakan ini ditarik dan tidak di terapkan sejak tanggal 4 Desember, 2003.

C. Kebijakan tarif impor baja dan alumunium tahun 2018

Pada tanggal 19 April, 2017, U.S. Secretary of Commerce, Wilbur Ross menginisiasi investigasi tentang dampak impor baja terhadap keamanan nasional. Pada tanggal 20 April, 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui dan menugaskan Secretary of Department of Commerce untuk melakukan investigasi tersebut. 26 April, 2017, Secretary of Department of Commerce mengajukan investigasi tentang dampak impor alumunium terhadap keamanan nasional. Pada 27 April, 2017. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui dan memerintahkan Secretary of Department of Commerce untuk melaksanakan investigasi yang diajukan.

Dari dua investigasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan untuk melaksanakan investigasi tersebut dan memberikan laporan dari investigasi yang dilakukan Secretary of Department of Commerce serta memberikan rekomendasi tindakan yang harus diambil terhadap hasil investigasi yang dilakukan.

Laporan dari investigasi dampak impor baja yang dikeluarkan oleh U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation dengan

laporan berjudul “The Effect of Import Steel On National Security”. di keluarkan pada tanggal 11 Januari, 2018. Sedangkan laporan investigasi dampak impor alumunium yang dikeluarkan oleh U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation dengan judul laporan “The Effect of Imports of Steel On the National Security” di keluarkan pada tanggal 17 Januari, 2018.

Pada laporan investigasi dampak impor baja, terdapat beberapa temuan penting (U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation, 2018) antara lain:

1. Amerika Serikat merupakan importir baja terbesar di dunia dimana impor baja yang dilakukan oleh Amerika Serikat mencapai empat kali lipat dari ekspor baja yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
2. Enam pengapian baja atau tempat peleburan dengan oksigen dan empat tempat peleburan baja dengan listrik tutup sejak tahun 2000, serta lapangan pekerjaan dari sektor ini telah menurun sebesar 35 persen sejak tahun 1998.
3. Dalam kemampuan produksi rata-rata perbulan, Republik Rakyat Tiongkok memproduksi hampir setara dengan kemampuan produksi baja Amerika Serikat per tahunnya, pada jenis produk baja tertentu seperti trafo listrik hanya tersisa satu produsen saja di Amerika Serikat (U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation, 2018).

Dari temuan investigasi dampak impor baja terdapat beberapa rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan sebagai respon terhadap temuan dari investigasi yang dilakukan, rekomendasi tersebut antara lain (U.S. Department of

Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation, 2018):

1. Penerapan tarif secara global minimal 24 persen terhadap impor baja dari seluruh negara.
2. Penerapan tarif minimal 53 persen terhadap 12 negara (Brazil, Republik Rakyat Tiongkok, Kosta Rika, Mesir, India, Malaysia, Korea Selatan, Rusia, Afrika Selatan, Thailand, Turki, dan Vietnam) serta penerapan kuota terhadap negara lain sebesar sama dengan seluruh ekpsor yang dilakukan oleh negara terkait pada tahun 2017.
3. Penerapan kuota terhadap seluruh negara sebesar 63 persen dari jumlah ekspor masing-masing negara ke Amerika Serikat di tahun 2017.

Rekomendasi tindakan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi domestik baja dari sebelumnya sebesar 73 persen menjadi 80 persen dari kemampuan produksi. Penetapan minimal dari setiap rekomendasi bertujuan untuk melindungi kelangsungan industri dalam jangka panjang (U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation, 2018).

Pada laporan tentang dampak impor alumunium yang dikeluarkan oleh U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation dengan judul “The Effect of Imports of Steel On the National Security” terdapat beberapa poin penting hasil temuan dari investigasi sebagai berikut (U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation, 2018):

1. Impor alumunium telah meningkat sebesar 90 persen dari total permintaan terhadap

alumunium primer, meningkat dari 66 persen di tahun 2012.

2. Dari tahun 2013 hingga 2016 lapangan pekerjaan dari industri alumunium telah menurun sebesar 58 persen, 6 tempat peleburan logam (*smelters*) tutup, dan hanya dua dari lima tempat peleburan logam yang beroperasi sesuai dengan kapasitas produksinya, meskipun permintaan terhadap alumunium telah meningkat pesat.
3. Pada pengurangan anggaran dana militer, konsumsi militer terhadap alumunium hanya presentase kecil dari total konsumsi alumunium, sehingga tidak dapat mempertahankan kelangsungan tempat peleburan logam. sebagai contoh hanya terdapat satu tempat peleburan logam yang dapat memproduksi alumunium berkualitas tinggi yang diperlukan bagi kedirgantaraan militer dan infrastruktur yang berguna bagi keamanan ekonomi adalah penggunaan utama dari alumunium di Amerika Serikat.
4. *U.S. Department of Commerce* mengembangkan kasus tentang praktik *dumping* dari komoditi alumunium, hingga tanggal 15 Februari, 2018. Amerika Serikat telah mengeluarkan dua perintah tugas tindakan anti-*dumping* terhadap alumunium, dimana hal ini ditujukan kepada Tiongkok, dan terdapat empat investigasi lainnya yang sedang berlangsung terhadap Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Dari laporan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, beberapa rekomendasi tersebut antara lain (U.S. Department of

Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation, 2018):

1. Penerapan tarif terhadap ekspor alumunium yang masuk ke Amerika Serikat minimal sebesar 7,7 persen
2. Tariff sebesar 23.6 persen terhadap seluruh produk dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Rusia, Venezuela, dan Vietnam. Negara lainnya dikenakan kuota sebesar sama dengan 100 persen dari total ekspor tahun 2017 ke Amerika Serikat.
3. Penerapan kuota terhadap seluruh impor dari semua negara dengan besaran maximum sebesar 86,7 persen dari ekspor mereka ke Amerika Serikat.

Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi alumunium dari sebelumnya rata- rata sebesar 48 persen menjadi 80 persen dari kemampuan produksi. Angka tersebut diperlukan untuk dicapai dengan tujuan kelangsungan industri alumunium dalam jangka panjang (U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation, 2018). Dari rekomendasi atas dua laporan yang dilakukan oleh U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation. Terdapat poin penting yakni, penerapan tarif dan kuota terhadap produk baja dan alumunium yang di ekspor ke Amerika Serikat dari negara lain. Tarif dapat di definisikan sebaga

Dari hasil Laporan yang dikeluarkan oleh U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of Technology Evaluation. Pada tanggal 8 Maret, 2018, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan kebijakan tarif impor baja dan alumunium. Isi dari kebijakan tersebut adalah penerapan tarif impor terhadap komoditi baja yang masuk ke Amerika Serikat sebesar 25

persen *ad volerem*[2] (White House, 2018), dan penerapan tarif impor alumunium yang masuk ke Amerika Serikat sebesar 10 persen *ad volerem* (White House, 2018). Kebijakan tarif terhadap baja dan alumunium ini berlaku dan diterapkan kepada seluruh negara, kecuali Meksiko dan Kanada. Kedua negara tersebut dikecualikan secara khusus mengingat sejarah dan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, dan oleh karena nya akan dilakukan diskusi lebih lanjut terkait penerapan kebijakan tarif impor baja dan tarif impor alumunium dengan kedua negara tersebut.

2 Tarif pajak yang berlaku secara langsung sesuai dengan nilai jumlah barang (Carbaugh, 2008)